



**JURNAL
AKUNTANSI DAN GOVERNANCE ANDALAS**

Journal homepage : www.jaga.unand.ac.id



Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Pimpinan dan Perangkat Pendukung (Teknologi Informasi) Terhadap Penerapan SIPKD (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu)

Aris Setiawan^a

^a Fakultas Ekonomi, Universitas Panca Bhakti, email: arissetiawan@upb.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima: 1 Agus 2020 Diterima revisian: 15 Nov 2020 Diterima publikasi: 2 Des 2020	<i>The purpose of this study was to determine and obtain empirical evidence of the influence of human resource competencies, leadership commitment and supporting devices (information technology) on the application of SIPKD to the Kapuas Hulu Regency government. The population in this study were all SKPDs in Kapuas Hulu Regency. Sampling in this study used a survey method with a total of 71 research samples. Hypothesis testing analysis techniques using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the competence of human resources, the commitment of leaders and supporting devices (information technology) has a positive and significant effect on the implementation of SIPKD in the Kapuas Hulu district government means that the better the competency of human resources they have, the high commitment of leaders and supporting devices (information technology) the better the application of SIPKD will be better.</i>
Kata Kunci: <i>Implementation of SIPKD Human Resource Competencies Leadership Commitments Supporting Devices (Information Technology)</i>	

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pada era globalisasi saat ini memberikan tantangan yang besar bagi organisasi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan daerah harus disertai dengan komitmen yang tinggi berupa penerapan prinsip *good governance* dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan

dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. Bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan di daerahnya dalam kerangka otonomi daerah adalah menyediakan informasi terkait keuangan secara komprehensif kepada masyarakat untuk tercapainya pemerintahan yang transparan. Pemberlakuan otonomi daerah pada dasarnya merupakan pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku (Syahdi & Bijaang, 2018).

Pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan yang luas dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Hak dan kewenangan yang diberikan tersebut pada hakekatnya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan baik kepada masyarakat maupun pemerintah pusat (Syahdi & Bijaang, 2018). Otonomi daerah membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah.

SIPKD merupakan salah satu manifestasi aksi nyata dari kementerian dalam negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. Usaha keras harus dilakukan pemerintah daerah apabila menrapkan sistem informasi tersebut. Perlu penyediaan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada publiK serta menjadi dasar bagi para pejabat pembuat kebijakan di daerah maupaun pusat dalam membuat keputusan.

Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai aplikasi penunjang, juga dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Salah satu faktor kurang efektifnya pengelolaan keuangan daerah adalah terletak pada kompetensi sumber daya manusianya, dimana SDM yang tidak memahami dan menguasai sistem keuangan akan menyebabkan terhambatnya pengelolaan keuangan. Kompetensi SDM adalah karakteristik dari seseorang yang mempunyai kemampuan, keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan suatu pekerjaan (Evicahyani & Setiawina, 2016). Kualitas SDM yang didukung dari segi pendidikan yang baik akan menambah kepercayaan pengguna SIPKD dalam menyelesaikan tugasnya (Suryaningrat & Utama, 2019).

Penerapan SIPKD juga harus didukung dengan adanya perangkat pendukung yang memadai seperti perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat pendukung yang dimaksud adalah ketersediaan jaringan, komputer dan teknologi informasi yang memadai dalam pengelolaan keuangan. Secara sederhana teknologi informasi dapat dikatakan sebagai ilmu

yang diperlukan untuk mengelola informasi agar informasi dapat dengan mudah dicari dan akurat.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu kabupaten terbesar yang berada Di Kalimantan Barat. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD). Penerapan SIPKD diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif dan ekonomis. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan daerah yang berkaitan dengan penerapan SIPKD agar dapat diikuti oleh semua satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk dapat menerapkan SIPKD dengan maksimal harus didukung oleh berbagai aspek, seperti sumber daya manusia yang berkompeten, teknologi informasi yang memadai berupa jaringan internet dan pemerataan pembangunan pada pemerintah daerah tersebut.

2. LANDASAN TEORI

Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi adalah aktivitas yang menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Pada organisasi sektor publik informasi akuntansi digunakan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sektor ekonomi, sosial dan politik. Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia saat ini sangatlah pesat. Bastian (2010:3) mendefinisikan akuntansi sektor publik adalah:

“Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta”.

Terjadinya reformasi diberbagai dunia termasuk Negara Indonesia memberikan dampak yang signifikan dalam perkembangan sistem akuntansi sektor publik. Adanya reformaasi tersebut mengakibatkan tuntutan pada pemerintah agar akuntansi sektor public dikelola secara professional dan efisien. Pemerintah dituntut untuk cepat tanggap dengan tuntutan lingkunganya serta senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan pengelolaan keuangan yang terbaik secara transparan dan akuntabel.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang

berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Aplikasi ini adalah sebagai alat bantu dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah secara elektronik, informasi keuangan daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

SIPKD merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini baru mulai diterapkan di Kabupaten Buleleng mulai tahun 2011. Karena program aplikasi ini baru, tentu saja memerlukan sosialisasi kepada pegawai agar lebih memahami tentang penggunaan aplikasi SIPKD ini. Oleh sebab itu program pendidikan dan pelatihan dapat menjadi sebuah solusi yang dapat diambil untuk lebih meningkatkan kompetensi pegawai dan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman kepada pegawai dalam penyelesaian pekerjaannya, terutama dalam meningkatkan kualitas pegawai dan pemahaman akan aplikasi SIPKD.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah seperangkat tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan tertentu yang menjadi syarat utama dan elemen kunci bagi lahirnya kepemimpinan yang efektif dan efisien. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien serta sesuai dengan standar kinerja yang diisyaratkan.

Secara umum kompetensi dipahami sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), atribut personal dan pengetahuan (Knowledge) yang tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Menurut Zuliarti (2012), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektivitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan suatu keluaran (outputs) dan hasil (outcomes).

Perangkat Pendukung (Teknologi Informasi)

Menurut Gelinas, Oram dan Wiggins (1990), sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan dan mengelola data serta menyediakan

informasi keluaran kepada para pemakai. Bodnar dan Hopwood (1993), sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Sedangkan Hall (2001), sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Abdul Kadir (2014) yang dimaksud dengan informasi tidak harus melibatkan komputer. Sistem informasi yang menggunakan komputer biasa disebut sistem informasi berbasis komputer.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik serta menitik beratkan pada pengujian hipotesis. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional yang disusun untuk meneliti kemungkinan hubungan yang terjadi antar variabel (Ghozali, 2016).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai SKPD- SKPD yang berada di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Alat analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk memprediksi seberapa besar kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Penerapan SIPKD

X1 : Kompetensi sumber daya manusia

X2 : Komitmen pimpinan

X3 : Perangkat pendukung (Teknologi Informasi)

a : Konstanta

b1, b2, b3 : Koefisien regresi

e : Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Responden

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui survey dengan menyebarkan kuesioner kepada Kepala pimpinan SKPD serta bagian keuangan dan akuntansi. Berikut ini

merupakan hasil data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada para responden yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Gambaran Umum Responden

Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	49	69,01%
Perempuan	22	30,99%
Pendidikan		
SMA	10	14,08%
D3	22	30,99%
S1	37	52,11%
S2	2	2,82%

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan data table 1 dapat diketahui bahwa jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 71 orang pegawai SKPD di Kabupaten Kapuas Hulu. Jika dilihat dari jenis kelamin maka responden yang paling dominan menjawab kuesioner ini adalah responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 69,01%. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan maka responden yang paling dominan menjawab kuesioner ini adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan S1/Strata satu dengan persentase sebesar 52.11%.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Dalam penelitian ini untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak akan dilakukan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test*.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	71
Test Statistic	0,096
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,177

Sumber: hasil ouput SPSS 25

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan pengujian *kolmogorov-smirnov* pada tabel 2 diketahui bahwa nilai signifikasi adalah sebesar $0,177 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Dalam penelitian ini untuk mengetahui korelasi antar variabel bebas (independen) dilakukan dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel bebas (independen).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

No	Variabel	Torelance	VIF	Keterangan
----	----------	-----------	-----	------------

1	Kompetensi SDM	0,693	1,443	Bebas
2	Komitmen Pinpinan	0,627	1,595	Bebas
3	Perangkat Pendukung (TI)	0,707	1,415	Bebas

Sumber: hasil ouput SPSS 25

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada table 4.6 dapat diketahui bahwa VIF pada variabel Kompetensi SDM memiliki nilai tolerance sebesar 0,693 sedangkan nilai VIF sebesar 1,443, variabel Komitmen Pinpinan memiliki nilai tolerance sebesar 0,627 sedangkan nilai VIF sebesar 1,595, variabel Perangkat Pendukung (TI) memiliki nilai tolerance sebesar 0,707 sedangkan nilai VIF sebesar 1,415, berdasarkan data ini dapat diketahui bahwa pada setiap variabel independen memiliki nilai tolerance di atas 0,5 serta nilai VIF kurang dari 10,00 maka dapat disimpulkan bahwa pada setiap variabel penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinieritas dan layak digunakan untuk penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	<i>t-value</i>	Signifikansi
(Constant)	0,558	0,579
Kompetensi SDM	1,528	0,131
Komitmen Pinpinan	0,111	0,912
Perangkat Pendukung (TI)	-1,439	0,155

Sumber: hasil ouput SPSS 25

Hasil uji Glejser pada tabel 4.7, menunjukkan hasil bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai signifikansi $> 0,05$, sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model ini.

Analisis Regresi Berganda

Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen yang ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square*. Berikut ini hasil output SPSS 25 untuk koefisien determinasi:

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,843	0,710	0,697	1,780

Sumber : Hasil Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,697, hal ini berarti bahwa variasi penerapan SIPKD dapat dijelaskan oleh kompetensi sumber daya manusia, komitmen pimpinan dan perangkat pendukung (TI) sebesar 69,7%. Sedangkan sisanya ($100\% - 69,7\% = 30,3\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Pengujian (Uji t)

Uji t digunakan untuk membuktikan hipotesis serta untuk mengetahui apakah variabel kompetensi sumber daya manusia, komitmen pimpinan dan perangkat pendukung (TI) dapat mempengaruhi penerapan SIPKD. Hasil pengujian Uji statistik t disajikan berikut ini:

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>t-value</i>	Signifikansi
	B	Std. Error		
(Constant)	-15,099	2,800	-5,393	0,000
Kompetensi SDM	0,778	0,148	5,261	0,000
Komitmen Pimpinan	0,462	0,104	4,441	0,000
Perangkat Pendukung (TI)	0,487	0,155	3,150	0,002

Sumber : Hasil Output SPSS 25

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Penerapan SIPKD Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh terhadap penerapan SIPKD pada pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Ini dapat diartikan bahwa pegawai yang mempunyai kompetensi yang baik akan lebih mudah untuk menggunakan SIPKD. Indikator kompetensi SDM (latar belakang Pendidikan, pemahaman terhadap peraturan dan standar, pelatihan dan bimtek, serta pengalaman bekerja). Pengelolaan keuangan akan berjalan dengan efektif dan berkualitas apabila didukung dengan SDM yang memahami dan berkompeten dalam akuntansi pemerintahan (Triwardana, 2017). Kompetensi SDM yang baik akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik (Herawati, Malisan, & Kusumawardani, 2016).

Hasil penelitian ini didukung dengan pegawai yang menjadi responden didalam penelitian ini rata-rata memiliki jenjang pendidika Strata 1 (S1) dengan presentase sebesar 52,11%. Latar belakang Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pemahaman pegawai dalam bidang akuntansi. Penerapan SIPKD pada pemerintah daerah akan berberhasil

apabila didukung dengan kompetensi SDM yang baik. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Syahdi & Bijaang, (2018), Evicahyani & Setiawina, (2015) dan Juniarta & Asana, (2020) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia yang berkompeten akan lebih mudah untuk memahami akuntansi dan pengelolaan keuangan seperti penerapan SIPKD.

Pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan SIPKD Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SIPKD pada pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Ini dapat diartikan bahwa keberhasilan dalam penerapan SIPKD pada pemerintah daerah harus didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan. Komitmen pimpinan dapat ditujukan melalui dikeluarkannya peraturan daerah yang mendukung penerapan SIPKD, adanya buku pedoman penerapan SIPKD dan penyelenggaraan pelatihan serta pendampingan kepada pegawai dalam penerapan SIPKD. Komitmen pimpinan yang kuat dan besar dalam penerapan SIPKD, maka akan semakin efektif pula penerapan standar akuntansi pemerintahan tersebut (Juniarta & Asana, 2020).

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus meningkatkan pelaksanaan pelatihan kepada pegawai bagian keuangan dan akuntansi agar para pegawai lebih memahami penggunaan SIPKD. Semakin baik dan meningkat pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan serta semakin meningkat penerapan hasil dari pelatihan yang diperoleh, maka semakin baik pula tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Sukriani, Marvilianti Dewi, & Wahyuni, 2018). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evicahyani & Setiawina, (2015) dan Juniarta & Asana, (2020) yang menyatakan bahwa komitmen pimpinan yang kuat dalam penerapan SIPKD dapat dituangkan dalam bentuk pelatihan kepada para pegawai sehingga penerapan standar akuntansi pemerintah lebih efektif.

Pengaruh Perangkat Pendukung (TI) terhadap Penerapan SIPKD Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa perangkat pendukung (Teknologi Informasi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SIPKD pada pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Ini dapat diartikan bahwa keberhasilan dalam penerapan SIPKD pada pemerintah daerah harus didukung dengan adanya perangkat pendukung (TI). Perangkat pendukung yang dimaksud adalah ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang dimaksud adalah ketersediaan computer yang khusus digunakan untuk penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIPKD pada

setiap SKPD di Kabupaten Kapuas Hulu dan perangkat lunak yang dimaksud adalah ketersediaan jaringan untuk mengkases aplikasi SIPKD pada setiap SKPD.

Penerapan SIPKD menuntut teknologi dengan spesifikasi yang terbaru dan tercanggih baik teknologi hardware, software dan informasi (Sukriani et al., 2018). Penggunaan TI yang tepat dan dimaksimalkan manfaatnya akan sangat mempengaruhi penerapan SIPKD. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini adalah tidak meratanya ketersediaan jaringan internet pada seluruh SKPD yang ada. Sehingga penerapan SIPKD tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Sukriani et al., (2018) yang menyatakan bahwa keberhasilan penerapan SIPKD harus didukung dengan adanya teknologi informasi yang terbaru dan tercanggih serta ketersediaan jaringan internet. Namun penelitian ini berlawanan dengan yang dilakukan oleh P. Ayu dan Ni Putu (2014) yang menyatakan TI tidak berpengaruh terhadap penerapan SIPKD.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara Pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM), komitmen pimpinan dan perangkat pendukung (Teknologi Informasi) terhadap penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD pada pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD). Hasil ini ditunjukkan dari angka hasil pengujian dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) dan nilai koefisien regresi kompetensi SDM sebesar 0,778 dan nilai t hitung dari kompetensi SDM sebesar 5,261 ($t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$). Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi penerapan SIPKD pada pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 2) Hasil pengujian variabel komitmen pimpinan mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,467 dan nilai t hitung sebesar 4,441 ($t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel komitmen pimpinan berada dibawah nilai taraf signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua diterima sehingga dapat diartikan variabel komitmen pimpinan berpengaruh terhadap penerapan SIPKD.

- 3) Hasil pengujian variabel perangkat pendukung (TI) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,155 dan nilai t hitung sebesar 3,150 ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel perangkat pendukung (TI) berada dibawah nilai taraf signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga diterima sehingga dapat diartikan variabel komitmen berpengaruh terhadap penerapan SIPKD.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat diberikan saran penelitian sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan jaringan internet yang masih terbatas pada pemerintah kabupaten Kapuas hulu harus segera ditambah agar implementasi SIPKD dapat dilakukan secara maksimal.
- 2) Penelitian berikutnya diharapkan dapat lebih meningkatkan tingkat pengembalian jumlah kuesioner yang dapat diolah sehingga hasil penelitian yang dihasilkan dapat maksimal.
- 3) Nilai *Adjusted R square* mencerminkan faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SIPKD.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang Nomor 33. 2004. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(1).
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(3), 403–428.
- Herawati, E., Malisan, L., & Kusumawardani, A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 1(1), 12–19.
- Juniartha, I. W., & Asana, G. H. S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Gianyar. *Jurnal Research Accounting*, 02(1), 165–180.
- Sukriani, L., Marvilianti Dewi, P. E. D., & Wahyuni, M. A. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap

- Kualitas Laporan Keuangan Bumdes Di Kecamatan Negara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(3), 85–97.
- Suryaningrat, A. A. A. M., & Utama, I. M. S. (2019). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Pemerintah Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi*, 23(1), 1–16. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/view/47058>
- Syahdi, M. Z., & Bijaang, D. (2018). Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi pegawai terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Volume 1 N(e-ISSN : 2622-6383).
- Triwardana, D. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD. *JOM Fekon*, 4(1), 641–655.